

Optimalisasi SIPD dalam Memperkuat Pengelolaan SPP dan SPM pada Dinas Koperasi Kabupaten Badung

I Gusti Agung Ayu Intan Fatmayoni^{1*}, Putu Diah Krisna Junitasari², Ni Komang Adriani³

^{1,2,3} Prodi Akuntansi, Politeknik Nasional, Denpasar, Bali

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Diterima 8 Februari 2026

Revisi 15 Maret 2026

Diterima 20 Maret 2026

Terbit 30 April 2026

Kata kunci:

SIPD, SPP, SPM, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam memperkuat proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD mampu meningkatkan efektivitas, ketepatan, dan efisiensi proses penginputan serta pengelolaan dokumen SPP dan SPM. Sistem ini juga membantu meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat proses verifikasi data keuangan. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti gangguan sistem, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala jaringan yang menyebabkan keterlambatan proses penginputan data. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pelatihan pegawai, penguatan koordinasi, dan pengembangan sistem agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah..

Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\) License](#)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai bidang, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Teknologi informasi tidak hanya digunakan sebagai alat bantu komunikasi, tetapi juga menjadi sarana penting dalam pengelolaan data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi pemerintahan.

Pemerintah Indonesia terus melakukan inovasi dalam bidang digitalisasi administrasi pemerintahan melalui penerapan sistem informasi berbasis elektronik. Salah satu bentuk implementasi digitalisasi tersebut adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung proses pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara terintegrasi. Kehadiran SIPD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi pemerintahan daerah sehingga proses pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, administrasi pembayaran merupakan salah satu bagian penting yang harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses administrasi tersebut melibatkan dokumen Surat Permintaan

*I Gusti Agung Ayu Intan Fatmayoni
Email: intan.fatmayoni15@gmail.com

Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). SPP merupakan dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan atau belanja daerah, sedangkan SPM merupakan dokumen yang diterbitkan sebagai dasar pencairan dana. Kedua dokumen tersebut memiliki peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah karena berkaitan langsung dengan pencairan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana pemerintah.

Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung sebagai salah satu organisasi perangkat daerah telah menerapkan SIPD dalam proses pengelolaan administrasi keuangan, khususnya pada pembuatan SPP dan SPM. Penerapan SIPD bertujuan untuk membantu pegawai dalam melakukan penginputan data, verifikasi dokumen, serta mempercepat proses administrasi pembayaran secara elektronik. Dengan adanya SIPD, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan terintegrasi sehingga mampu mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Penggunaan SIPD memberikan berbagai manfaat dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini mampu membantu penyimpanan data secara terpusat, mempercepat proses verifikasi dokumen, meningkatkan ketepatan penginputan data, serta mempermudah proses monitoring dan evaluasi administrasi keuangan. Selain itu, SIPD juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah karena seluruh proses administrasi tercatat secara sistematis dalam sistem. Dengan demikian, penggunaan SIPD menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Namun, dalam pelaksanaannya penggunaan SIPD masih menghadapi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas proses administrasi keuangan. Berdasarkan hasil observasi awal pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung, ditemukan beberapa permasalahan seperti terjadinya sistem error, gangguan jaringan internet, server yang lambat, serta keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi SIPD. Kendala tersebut menyebabkan proses penginputan dan verifikasi dokumen SPP dan SPM menjadi terhambat sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pencairan anggaran. Selain itu, perubahan sistem dan pembaruan fitur aplikasi yang dilakukan secara berkala juga menuntut pegawai untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem yang digunakan.

Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka dapat berdampak pada menurunnya efektivitas pengelolaan administrasi keuangan daerah. Keterlambatan dalam proses pembuatan SPP dan SPM dapat menghambat pelaksanaan kegiatan instansi dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi penggunaan SIPD agar sistem dapat digunakan secara maksimal dan mampu mendukung proses administrasi keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sistem, penguatan infrastruktur jaringan, peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, serta peningkatan koordinasi antarbagian terkait dalam penggunaan SIPD.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam memperkuat proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan SIPD, hambatan yang dihadapi dalam penggunaannya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Adapun tinjauan pustaka meliputi:

1. Sistem Informasi merupakan gabungan antara teknologi, manusia, dan prosedur yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Sistem informasi bertujuan mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi.
2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem terintegrasi yang digunakan pemerintah daerah dalam pengelolaan informasi pembangunan dan keuangan daerah. SIPD membantu proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara elektronik.
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan atau belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Optimalisasi Sistem merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem agar mampu mencapai tujuan organisasi secara maksimal.
5. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran sebagai dasar pencairan dana oleh bendahara atau pihak terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai penerapan SIPD, hambatan yang dihadapi, serta upaya optimalisasi yang dilakukan dalam pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Lokasi penelitian dilakukan pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Raya Sempidi Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Objek penelitian difokuskan pada penggunaan SIPD dalam mendukung proses pembuatan dan pengelolaan dokumen SPP dan SPM pada bagian keuangan instansi tersebut.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pegawai bagian keuangan yang terlibat dalam proses penginputan serta pengelolaan SPP dan SPM menggunakan SIPD. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen administrasi, jurnal, buku, peraturan terkait SIPD, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung proses penggunaan SIPD dalam administrasi keuangan. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi mengenai efektivitas penggunaan SIPD, kendala yang dihadapi, dan solusi yang diterapkan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen SPP, SPM, dan tampilan aplikasi SIPD.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan sesuai fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk memudahkan pemahaman. Tahap terakhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung telah membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Penerapan SIPD mempermudah pegawai dalam melakukan penginputan data, verifikasi dokumen, serta pengelolaan administrasi keuangan secara lebih cepat dan terintegrasi. Sistem ini juga membantu mengurangi penggunaan dokumen manual sehingga proses administrasi menjadi lebih tertata dan akuntabel.

Penggunaan SIPD memberikan manfaat dalam meningkatkan ketepatan pengelolaan data keuangan. Fitur validasi otomatis pada sistem membantu meminimalkan kesalahan penginputan data dan mempercepat proses pemeriksaan dokumen sebelum diterbitkannya SPP dan SPM. Selain itu, data keuangan dapat tersimpan secara terpusat sehingga mempermudah proses monitoring dan pelaporan keuangan daerah.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penggunaan SIPD. Kendala tersebut meliputi gangguan jaringan internet, sistem error, server yang lambat, serta keterbatasan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi SIPD. Permasalahan tersebut menyebabkan keterlambatan dalam proses penginputan dan verifikasi dokumen SPP dan SPM. Selain itu, pembaruan sistem yang dilakukan secara berkala juga menuntut pengguna untuk terus menyesuaikan diri dengan fitur terbaru pada aplikasi.

Untuk mengatasi kendala tersebut, instansi melakukan beberapa upaya seperti meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), melakukan pelatihan penggunaan SIPD kepada pegawai, serta memperbaiki proses komunikasi antarbagian terkait. Dengan adanya upaya tersebut, penggunaan SIPD diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendukung pengelolaan administrasi keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung memberikan dampak positif terhadap proses pengelolaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Penggunaan SIPD membantu mempercepat proses administrasi keuangan karena seluruh data dapat diinput dan dikelola secara terintegrasi dalam satu sistem. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan SIPD juga mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi keuangan. Data yang tersimpan secara elektronik mempermudah proses pengawasan, pelaporan, dan verifikasi dokumen sehingga risiko kesalahan administrasi dapat diminimalkan. Selain itu, fitur validasi otomatis dalam sistem membantu meningkatkan ketepatan penginputan data dan mengurangi kesalahan manual yang sebelumnya sering terjadi pada proses administrasi konvensional.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan SIPD masih menghadapi beberapa hambatan teknis dan nonteknis. Gangguan jaringan internet, server yang lambat, dan sistem error menjadi kendala utama yang mempengaruhi kelancaran proses penginputan data SPP dan SPM. Kendala tersebut menyebabkan keterlambatan proses administrasi dan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pencairan anggaran. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan SIPD juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan sistem. Tidak semua pegawai memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap penggunaan aplikasi sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan secara berkala.

Berdasarkan hasil penelitian, optimalisasi penggunaan SIPD memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, peningkatan kompetensi pegawai, serta koordinasi yang baik antarbagian terkait. Dengan adanya perbaikan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan SIPD diharapkan mampu mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung telah membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). SIPD mempermudah proses penginputan data, verifikasi dokumen, serta pengelolaan administrasi keuangan secara lebih cepat, terintegrasi, dan akuntabel. Selain itu, penggunaan SIPD juga membantu meminimalkan kesalahan administrasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti gangguan jaringan internet, sistem error, server yang lambat, serta keterbatasan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi SIPD. Kendala tersebut dapat mempengaruhi kelancaran proses administrasi dan menyebabkan keterlambatan pengelolaan dokumen SPP dan SPM. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sistem, penguatan infrastruktur jaringan, serta pelatihan bagi pegawai agar penggunaan SIPD dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung disarankan untuk meningkatkan kualitas jaringan internet dan melakukan pemeliharaan sistem SIPD secara berkala agar proses administrasi keuangan dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi secara rutin kepada pegawai untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengoperasikan SIPD.

Instansi juga diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarbagian terkait dalam proses pengelolaan SPP dan SPM sehingga kendala yang terjadi dapat segera ditangani. Selain itu, pengembangan dan penyempurnaan fitur SIPD perlu dilakukan secara berkelanjutan agar sistem mampu mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

UCAPAN TERIMAKASI

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu memberikan data, informasi, serta arahan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengelolaan administrasi keuangan daerah.

REFERENSI

- Novira. (2023). Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 7.1, 170-175. [Penerapan Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut | Novira | Konferensi Nasional Ilmu Administrasi](#)
- Athallah, M. R. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Sistem Informasi pemerintah Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah Di Kota Malang.
- Brien. (2005). Komponen Sistem Informasi.
- Cahyani, I. G. (2024). Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Kas pada Kantor Wali Kota Manado.
- Hall. (2009). Pengertian Sistem Informasi.
- Jogiyanto. (2005). Kualitas Sistem Informasi
- Kelana, M. A. (2024). Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau Dalam Perspektif George R. Terry. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*. [Manajemen Aplikasi SIPD di Inspektorat Provinsi Riau Dalam Perspektif George R. Terry | Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia](#)
- Madiyanto. (2021). Sistem Informasi.
- Nafsir, L. M. (n.d.). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Dalam Mendukung Tata Kelola Keuangan Publik yang Baik di Kabupaten Buton Utara. 2021.
- Nanda, P. (2012). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Nasution. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatra Utara.
- Prastyo, I. M. (2022). Peran Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Ketetapan Informasi Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
- Rohma, F. F. (2023). *Upaya Sinkronisasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dengan Program Magang Industri Guna Mendorong Efisiensi Kerja*. Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Saputra, A. (2019). *Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*.
- Seah, J. (2020). *Sistem Informasi*.
- Triyani, Z. (2018). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*.
- Wahyudi. (2019). *Definisi Sistem Informasi*.
- Arifin. (2022). *Analisa Perancangan Sistem Informasi*. Jurnal Akuntansi Bisnis.
- Karundeng. (2021). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau*.

- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado)*. Jurnal Eksekutif, 2(5). [IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO \(Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado\) | JURNAL EKSEKUTIF](#)